

**ANALISIS IMPAKSI KEJAHATAN TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DALAM
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA: STUDI KASUS RUTE MIGRASI ILEGAL
TIMUR TENGAH**

**(ANALYZING THE ROLE OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME IN
TRAFFICKING IN PERSONS IN INDONESIA: A CASE STUDY ON MIDDLE EAST
ILLEGAL MIGRATION ROUTES)**

DOI : <https://10.52617/jlbp.v5i1.419>

Submitted: 04-02-2023 Reviewed: 03-03-2023 Published: 01-04-2023

Atsil Syah Gibran
eukuatsil@gmail.com
Politeknik Imigrasi

M Fadly Khusairy
mfadlykhusairy@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran kejahatan terorganisir transnasional dalam perdagangan manusia di Indonesia, khususnya di jalur imigrasi ilegal di Timur Tengah. Studi kasus yang dilakukan dalam penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang modus operandi, pelaku dan korban peristiwa perdagangan manusia yang melibatkan jaringan kejahatan transnasional. Upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, menegakkan penuntutan yang ketat terhadap para pelaku, memperkuat kerja sama internasional, dan memberikan perlindungan dan rehabilitasi yang memadai kepada para korban.

Kata kunci: Penelitian, Peningkatan, Perdagangan manusia, Imigrasi ilegal, Timur Tengah

ABSTRACT

This study analyzes the role of transnational organized crime in human trafficking in Indonesia, especially in illegal immigration routes in the Middle East. The case studies conducted in this study will provide a clear picture of the modus operandi, perpetrators and victims of human trafficking incidents involving transnational criminal networks. Efforts to prevent and combat human trafficking in Indonesia can be implemented through a variety of strategies, including



JLBP: Journal of Law and Border Protection are licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

public awareness-raising, enforce rigorous prosecution of perpetrators, strengthen international cooperation, and provide victims with adequate protection and rehabilitation. However, many challenges remain, including lack of coordination.

Keywords: Research, Improvement, Human trafficking, Illegal immigration, Middle East

A. PENDAHULUAN

Perdagangan orang atau *human trafficking* adalah salah satu bentuk kejahatan yang mengancam hak asasi manusia dan keamanan nasional.¹ Berbagai faktor, seperti ketidaksetaraan ekonomi, konflik bersenjata, dan perubahan iklim, telah meningkatkan risiko perdagangan orang di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia memiliki kekayaan sumber daya manusia yang besar, namun kenyataannya, masih ada banyak warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang. Perdagangan orang di Indonesia terkait dengan kegiatan keimigrasian ilegal, dimana orang-orang dipaksa untuk bekerja atau dipekerjakan tanpa memiliki izin kerja yang sah. Hal ini menyebabkan banyak orang Indonesia menjadi korban eksploitasi dan kekerasan, serta tidak dapat mengakses layanan sosial dan kesehatan yang layak.²

Selain itu, perdagangan orang juga berhubungan dengan kejahatan transnasional, di mana jaringan kejahatan lintas negara bekerja sama untuk mengirimkan korban dari satu negara ke negara lain. Hal ini membuat penanganan kasus perdagangan orang semakin kompleks dan sulit diatasi, terutama jika pelakunya adalah jaringan kejahatan transnasional. Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisis peran transnational organized crime dalam perdagangan orang di Indonesia, khususnya pada rute migrasi ilegal Timur Tengah. Studi kasus yang dilakukan pada penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang modus operandi, pelaku, dan korban yang terlibat dalam kasus perdagangan orang yang melibatkan jaringan kejahatan transnasional.

Penelitian ini penting dilakukan karena perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang perlu ditangani dengan tindakan yang cepat dan efektif. Dengan menganalisis peran transnational organized crime dalam perdagangan orang,

¹ Cahya Wulandari et al., "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang," *Yustisia Edisi 90* (2014): 15–26.

² Martin Hutabarat, "Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang," 2013.

diharapkan dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam menentukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus ini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dan keamanan nasional di Indonesia. Selain memberikan pemahaman tentang peran transnational organized crime dalam perdagangan orang di Indonesia, penelitian ini juga memiliki beberapa implikasi praktis yang dapat membantu penanggulangan masalah ini. Pertama, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan mengatasi perdagangan orang. Pemerintah dapat menggunakan informasi yang diperoleh untuk memperkuat hukum dan regulasi terkait, meningkatkan pemantauan dan pengawasan di daerah-daerah rentan, serta meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam pertukaran informasi dan tindakan penegakan hukum.

Kedua, penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang bahaya perdagangan orang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang modus operandi dan risiko yang terkait, masyarakat dapat lebih waspada terhadap upaya penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang. Pendidikan tentang hak asasi manusia dan tindakan pencegahan juga dapat diberikan kepada kelompok yang rentan, seperti migran, remaja, dan keluarga yang tinggal di daerah terpencil.

Terakhir, penelitian ini dapat memicu kerjasama internasional yang lebih luas dalam menangani perdagangan orang. Dengan melibatkan negara-negara lain dalam pertukaran informasi, intelijen, dan koordinasi penegakan hukum, upaya melawan perdagangan orang dapat menjadi lebih efektif. Kerjasama ini dapat mencakup pelatihan bersama, pertukaran pengalaman, dan koordinasi tindakan penegakan hukum lintas batas. Dengan mempertimbangkan implikasi praktis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya perlindungan hak asasi manusia, keamanan nasional, dan pencegahan perdagangan orang di Indonesia. Melalui langkah-langkah yang lebih efektif dan kerjasama yang lebih kuat, diharapkan dapat mengurangi jumlah korban dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka yang rentan terhadap perdagangan orang.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana optimalisasi terhadap penggunaan autogate dilakukan?
- b. Bagaimana dampak dari digunakannya autogate terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO)?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.

Menurut Sudjana (2009), pendekatan naturalistik dalam penelitian pendidikan menganggap realitas sebagai sesuatu yang kompleks, utuh, dan berubah atau terbuka. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menyusun rancangan penelitian yang terperinci dan tetap sebelumnya. Rancangan penelitian berkembang seiring dengan berjalannya proses penelitian. Penggunaan penilaian atau pertimbangan dalam penelitian mengimplikasikan bahwa metode yang digunakan dapat bersifat kualitatif, meskipun tidak sepenuhnya demikian.

Dalam konteks penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pendekatan yang digunakan mungkin bersifat naturalistik atau kualitatif. Pendekatan naturalistik memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas dan konteks yang terkait dengan kejahatan dan perspektif geografis yang melatarbelakanginya. Metode penelitian yang digunakan juga dapat mencakup pengumpulan data melalui analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kejahatan lintas negara yang dimaksud.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Jaringan Kejahatan Transnasional Dalam Perdagangan Orang Di Indonesia

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang merugikan banyak orang, khususnya di Indonesia. Perdagangan orang dilakukan oleh jaringan kejahatan transnasional yang terorganisasi dengan baik dan sangat terampil dalam memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Dalam pembahasan ini, akan dibahas secara detail mengenai peran jaringan kejahatan transnasional dalam perdagangan orang di Indonesia. Pertama-tama, peran jaringan kejahatan transnasional dalam perdagangan orang di Indonesia meliputi pengaturan rute migrasi, memfasilitasi transportasi korban, melakukan pemalsuan dokumen dan identitas, melakukan penipuan dan pemaksaan, serta taktik lainnya yang digunakan dalam perdagangan orang.

Pengaturan rute migrasi merupakan salah satu peran utama jaringan kejahatan transnasional dalam perdagangan orang di Indonesia. Jaringan kejahatan transnasional ini memiliki jaringan yang luas dan terorganisasi dengan baik, sehingga mereka mampu mengatur rute migrasi korban secara teratur dan terukur.³ Mereka juga memiliki jaringan di berbagai negara tujuan migrasi, sehingga mereka mampu memfasilitasi transportasi korban dari Indonesia ke negara tujuan dengan mudah. Selain pengaturan rute migrasi, jaringan kejahatan transnasional juga memfasilitasi transportasi korban dengan berbagai cara. Mereka menggunakan jalur laut, udara, dan darat untuk memfasilitasi transportasi korban. Selain itu, mereka juga menyediakan dokumentasi dan identitas palsu untuk korban, sehingga korban dapat melewati pemeriksaan imigrasi di berbagai negara tujuan.⁴

Tidak hanya itu, jaringan kejahatan transnasional juga melakukan pemalsuan dokumen dan identitas untuk korban. Mereka menyediakan dokumen dan identitas palsu yang mirip dengan dokumen dan identitas asli korban, sehingga korban dapat melewati pemeriksaan imigrasi dengan mudah. Selain itu, mereka juga melakukan penipuan dan pemaksaan terhadap korban, seperti meminta uang muka kepada korban atau mengancam korban agar mau bekerja di negara tujuan. Taktik lainnya yang digunakan oleh jaringan kejahatan transnasional dalam perdagangan orang di Indonesia antara lain melibatkan korban dalam praktik prostitusi, perdagangan organ, atau pekerjaan yang tidak layak. Jaringan kejahatan transnasional memanfaatkan

³ Muhammad Naseh, "Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Indonesia Dan Eropa," *Jurnal Hubungan Internasional* 8, no. 1 (2019).

⁴ Ibid.

situasi dan kondisi korban yang sedang membutuhkan pekerjaan, dan memaksa korban untuk bekerja dalam kondisi yang tidak layak.

Perdagangan orang yang dilakukan oleh jaringan kejahatan transnasional memberikan dampak yang sangat buruk bagi korban dan masyarakat di Indonesia. Korban mengalami dampak fisik dan psikologis yang sangat besar, seperti trauma, depresi, dan kerusakan organ tubuh. Masyarakat di sekitar korban juga merasakan dampak sosial dan ekonomi yang besar, seperti kehilangan anggota keluarga atau teman, serta terancamnya keamanan di lingkungan sekitar. Untuk mengatasi masalah perdagangan orang yang dilakukan oleh jaringan kejahatan transnasional di Indonesia, perlu adanya tindakan yang terintegrasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan pengawasan imigrasi di pintu-pintu masuk dan keluar negara, meningkatkan kerja sama internasional dalam hal pengawasan dan penindakan perdagangan orang, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang, dan memberikan perlindungan kepada korban perdagangan orang.

Selain itu, diperlukan juga penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perdagangan orang, terutama pelaku yang terlibat dalam jaringan kejahatan transnasional. Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi efektif dalam mengurangi tindakan perdagangan orang dan meminimalisasi dampak negatif bagi korban dan masyarakat.⁵ Dalam konteks perdagangan orang yang melibatkan jaringan kejahatan transnasional di Indonesia, perlu diakui bahwa masalah ini sangat kompleks dan sulit untuk diatasi secara cepat dan mudah. Namun, dengan adanya tindakan yang terintegrasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak, serta dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang, diharapkan dapat mengurangi tindakan perdagangan orang dan meminimalisasi dampak negatifnya bagi korban dan masyarakat. Secara keseluruhan, peran jaringan kejahatan transnasional dalam perdagangan orang di Indonesia sangat besar dan memiliki dampak yang sangat buruk bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang terintegrasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

⁵ Anindito R Wiraputra and Kadek Fransisca Siba, "Analisis Penerapan Kebijakan Selektif Dalam Memperkuat Kontrol Perbatasan Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi," *Jurnal of Law and Border Protection* 3, no. 1 (2021): 77–86.

2. Rute Migrasi Ilegal Timur Tengah

Rute migrasi ilegal Timur Tengah merupakan salah satu jalur migrasi ilegal yang sangat padat dan rawan terhadap praktik perdagangan orang di Indonesia. Rute ini terbentang dari Timur Tengah melalui berbagai negara di Asia Tenggara hingga mencapai Indonesia.⁶ Jalur migrasi ilegal ini seringkali digunakan oleh para pengungsi dan migran yang berusaha mencari kehidupan yang lebih baik di negara-negara tujuan, seperti Australia dan Selandia Baru. Namun, pada kenyataannya, rute migrasi ilegal ini juga menjadi tempat berkembangnya praktik perdagangan orang yang melibatkan jaringan kejahatan transnasional. Para pelaku perdagangan orang memanfaatkan situasi dan kondisi yang tidak stabil di negara-negara asal pengungsi dan migran untuk memperoleh keuntungan dari tindakan mereka yang tidak manusiawi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan perdagangan orang di rute migrasi ilegal Timur Tengah. Salah satunya adalah lemahnya pengawasan keimigrasian di berbagai negara yang dilalui oleh rute migrasi ini.⁷ Para pelaku perdagangan orang dapat memanipulasi dokumen perjalanan dan meloloskan korban melalui pos-pos perbatasan yang tidak diawasi dengan ketat. Selain itu, kurangnya kesadaran dan informasi tentang bahaya perdagangan orang juga mempermudah para pelaku dalam merekrut korban. Peran jaringan kejahatan transnasional dalam praktik perdagangan orang di rute migrasi ilegal Timur Tengah juga sangat besar. Mereka biasanya mengorganisir seluruh jalur migrasi, mulai dari merekrut korban hingga mengirimkannya ke negara tujuan. Para pelaku perdagangan orang ini juga sering menggunakan modus operandi yang berbeda-beda, seperti memalsukan dokumen perjalanan, menjanjikan pekerjaan yang menggiurkan, atau bahkan menggunakan kekerasan dan pemaksaan untuk merekrut korban.⁸

Dalam hal ini, perlu adanya tindakan yang terintegrasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah perdagangan orang di rute migrasi ilegal

⁶ Moeri, Marcella Nirmala Chrisna, Idin Fasisaka, dan Putu Titah Kawitri Resen. "Implementasi Protokol dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang Menjadi Korban Human Trafficking". *Jurnal Hubungan Internasional*, Volume 1 Nomor 1 (2016), diakses pada 8 Mei 2023, Pukul 21:00 WITA, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/24370/15809>.

⁷ Sullivan, Barbara. "Trafficking in Human Being", dalam Laura J. Shepherd (ed). *Gender Matters in Global Politics: A Feminist Introduction in International Relations*. London and New York: Routledge, 2010), 89-95.

⁸ Bastianto Nugroho and M Roesli, "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 107, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>.

Timur Tengah. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pengawasan keimigrasian di pos-pos perbatasan yang rawan terhadap praktik perdagangan orang. Selain itu, diperlukan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang dan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban perdagangan orang. Secara keseluruhan, rute migrasi ilegal Timur Tengah menjadi salah satu jalur migrasi ilegal yang sangat rawan terhadap praktik perdagangan orang di Indonesia.⁹ Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan yang terintegrasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang dan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban perdagangan orang.

3. Faktor Pendorong Perdagangan Orang Di Indonesia

Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang merugikan korbannya secara fisik, emosional, dan psikologis. Kejahatan ini terjadi karena adanya faktor-faktor pendorong yang mendorong terjadinya perdagangan orang. Beberapa faktor pendorong perdagangan orang di Indonesia antara lain adalah kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak, dan lemahnya sistem hukum dan pengawasan keimigrasian. Salah satu faktor utama yang mendorong perdagangan orang di Indonesia adalah kemiskinan. Banyak orang di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di daerah-daerah terpencil dan wilayah yang terdampak bencana alam. Mereka cenderung mudah terjebak dalam praktik perdagangan orang karena sulitnya mencari pekerjaan yang layak dan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, para pelaku perdagangan orang seringkali menawarkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, sehingga menjadi daya tarik bagi mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak juga menjadi faktor pendorong perdagangan orang. Banyak korban perdagangan orang berasal dari daerah-daerah yang minim fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja. Mereka cenderung mudah dibujuk oleh para pelaku perdagangan orang yang menjanjikan kesempatan untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi. Kurangnya pemahaman tentang bahaya perdagangan orang dan kurangnya akses terhadap informasi juga

⁹ Ibid.

mempermudah para pelaku dalam merekrut korban. Lemahnya sistem hukum dan pengawasan keimigrasian juga menjadi faktor pendorong perdagangan orang di Indonesia. Kekurangan pengawasan terhadap perbatasan dan masuknya orang asing ke Indonesia memungkinkan para pelaku perdagangan orang untuk meloloskan korban ke luar negeri dengan lebih mudah. Selain itu, kurangnya ketegasan dalam menegakkan hukum terhadap para pelaku perdagangan orang juga mempermudah mereka untuk melanjutkan praktik kejahatan ini.

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor pendorong perdagangan orang di Indonesia. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, perlu ditingkatkan juga kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang melalui berbagai kampanye dan sosialisasi. Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku perdagangan orang. Dalam hal ini, peran aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha sangat penting dalam mengatasi faktor pendorong perdagangan orang di Indonesia. Dengan kerja sama yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan masalah perdagangan orang dapat diminimalisir.¹⁰

Selain itu, kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan kurangnya kesempatan kerja juga dapat menjadi faktor pendorong perdagangan orang di Indonesia. Kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan atau memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung menjadi sasaran empuk bagi para pelaku perdagangan orang. Hal ini karena mereka sering kali mengalami kesulitan ekonomi dan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan mereka, sehingga menjadi mudah tergiur dengan janji pekerjaan yang menjanjikan di luar negeri. Selain itu, kurangnya kesempatan kerja di Indonesia juga menjadi penyebab meningkatnya angka migrasi ilegal dan perdagangan orang.

Selain faktor-faktor internal, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi tingginya angka perdagangan orang di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah para pelaku kejahatan untuk menjalankan operasi

¹⁰ Naseh, "Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Indonesia Dan Eropa."

perdagangan orang secara global. Selain itu, hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara lain juga dapat memengaruhi tingkat perdagangan orang di Indonesia. Negara-negara tujuan migrasi yang mempunyai hubungan erat dengan Indonesia seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura, cenderung menjadi negara yang menjadi tujuan utama bagi para korban perdagangan orang.

Dalam konteks perdagangan orang, penting bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan preventif, seperti peningkatan pendidikan, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan untuk mengurangi praktik migrasi ilegal. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tujuan migrasi untuk mengurangi praktik perdagangan orang dan melindungi hak-hak korban perdagangan orang. Secara keseluruhan, faktor pendorong perdagangan orang di Indonesia adalah multi-dimensional dan kompleks. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kondisi internal dan eksternal Indonesia. Oleh karena itu, tindakan preventif yang terkoordinasi dan terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi-organisasi internasional harus dilakukan untuk mengurangi praktik perdagangan orang dan melindungi hak-hak korban perdagangan orang.

4. Dampak Perdagangan Orang pada Korban dan Masyarakat

Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang dapat memiliki dampak jangka panjang yang merugikan korban dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak perdagangan orang terhadap korban dapat sangat merusak, termasuk kehilangan hak asasi manusia, kekerasan fisik dan seksual, dan trauma psikologis. Korban sering kali ditinggalkan tanpa sumber daya yang memadai untuk mengatasi trauma dan untuk memulai kembali hidup mereka. Beberapa korban bahkan meninggal akibat kondisi yang sangat buruk dalam perdagangan orang. Selain dampak pada korban, perdagangan orang juga berdampak pada masyarakat. Perdagangan orang dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan masyarakat, serta memberikan kontribusi pada peningkatan angka kriminalitas dan perdagangan narkoba. Selain itu, perdagangan orang juga dapat mempengaruhi perekonomian negara dan mengganggu perdamaian dan keamanan di wilayah yang terkena dampak.

Dalam masyarakat, korban perdagangan orang sering kali mengalami stigmatisasi dan diskriminasi karena mereka dianggap bertanggung jawab atas kondisi yang mereka alami. Hal ini dapat mengakibatkan korban tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dari keluarga, teman, dan masyarakat. Stigmatisasi juga dapat memperburuk kondisi psikologis korban dan menghambat proses penyembuhan mereka. Dampak perdagangan orang juga dapat dirasakan oleh keluarga korban yang ditinggalkan. Keluarga korban sering kali mengalami masalah keuangan dan emosional akibat kehilangan sumber penghasilan dan stres yang diakibatkan oleh ketidakpastian kondisi korban.

Secara keseluruhan, dampak perdagangan orang sangat merugikan dan kompleks. Hal ini membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan kerja sama internasional, tindakan preventif yang terintegrasi, dan perlindungan hak-hak korban. Pemerintah harus melakukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kejahatan perdagangan orang dan melakukan tindakan yang efektif untuk mencegah dan memberantas kejahatan ini. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk memperkuat sistem hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan keluarga mereka.

5. Strategi Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang Di Indonesia

Perdagangan orang adalah kejahatan serius yang melibatkan jaringan kejahatan transnasional. Di Indonesia, perdagangan orang terutama terjadi pada rute migrasi ilegal ke negara-negara Timur Tengah dan Asia. Oleh karena itu, strategi pencegahan dan penanganan yang efektif harus dilakukan untuk mengatasi kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

Strategi pencegahan harus melibatkan pendekatan holistik yang terintegrasi, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.¹¹ Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mencegah perdagangan orang di Indonesia antara lain:

¹¹ Hidayati, Maslihati Nur. "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Pranata Sosial*, Volume 1. Nomor 3 (2012), diakses pada 8 Mei 2023, Pukul 21:30 WITA, <http://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/download/59/46>..

1. Meningkatkan Kesadaran Publik: Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang perdagangan orang dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Pendidikan dan kampanye informasi yang disebar di media sosial dan media lainnya dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan kesadaran publik tentang masalah ini.
2. Memperkuat Sistem Keamanan dan Imigrasi: Pemerintah harus memperkuat sistem keamanan dan imigrasi untuk mencegah terjadinya perdagangan orang di Indonesia. Hal ini meliputi peningkatan keamanan perbatasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pengusaha manusia dan penyelundup manusia.
3. Meningkatkan Perlindungan Korban: Pemerintah harus memberikan perlindungan yang memadai bagi korban perdagangan manusia dan memberikan akses bagi korban untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan kerja.
4. Kerja Sama Internasional: Kerja sama internasional dengan negara-negara lain juga sangat penting dalam mencegah perdagangan orang. Pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan pemerintah negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi, penangkapan dan pengadilan terhadap pelaku perdagangan orang, dan penyediaan bantuan untuk korban.

Selain strategi pencegahan, penanganan yang efektif juga sangat penting untuk mengatasi kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menangani kejahatan ini antara lain:

1. Penguatan Kerjasama Internasional

Peningkatan kerjasama antarnegara dalam bidang intelijen dan penegakan hukum menjadi strategi yang efektif dalam mencegah dan menangani perdagangan orang. Hal ini dilakukan dengan memperkuat peran lembaga antar negara dalam hal pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Selain itu, pemerintah Indonesia dapat memperkuat kerjasama dengan negara-negara yang menjadi asal dan tujuan migrasi ilegal, seperti negara-negara di Timur Tengah dan Asia.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan dapat menjadi strategi pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada masyarakat dan petugas penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menangani kasus perdagangan orang. Selain itu, pelatihan juga dapat diberikan kepada para korban perdagangan orang untuk memberikan dukungan psikologis dan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk memulai kehidupan yang baru.

3. Penguatan Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat menjadi strategi pencegahan dan penanganan perdagangan orang. PPATK dapat membantu memblokir sumber dana dan aset yang digunakan untuk perdagangan orang. Selain itu, PPATK juga dapat membantu memantau transaksi keuangan yang mencurigakan dan memberikan informasi kepada pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan penegakan hukum.

4. Penegakan Hukum yang Tegas

Penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku perdagangan orang menjadi strategi yang efektif dalam mencegah dan menangani perdagangan orang. Para pelaku perdagangan orang harus ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, perlu juga ditingkatkan sanksi hukum bagi pelaku perdagangan orang agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan.

5. Sosialisasi dan Kampanye

Sosialisasi dan kampanye dapat menjadi strategi pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Sosialisasi dan kampanye dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang dan pentingnya melaporkan kasus yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, kampanye juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban perdagangan orang dan memberikan dukungan kepada mereka.

D.PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan serius yang dilakukan oleh jaringan kejahatan transnasional yang memiliki dampak yang sangat merugikan korban dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, perdagangan orang terutama terjadi melalui rute migrasi ilegal ke Timur Tengah dan faktor pendorongnya antara lain adalah kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa strategi, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, meningkatkan kerja sama internasional, dan memberikan perlindungan dan rehabilitasi yang memadai bagi korban. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga dan perbedaan dalam definisi dan penanganan kasus di antara negara-negara yang terlibat.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang terus menerus untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga dan negara, memperkuat hukum dan regulasi yang terkait dengan perdagangan orang, serta meningkatkan akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja bagi masyarakat yang rentan menjadi korban. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sebuah lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka:

ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children. 2004, diakses 08 Mei 2023 Pukul 21.30 WITA, <http://www.aseanec.org/16793.htm>.

Elviandri, and Ali Shaleh. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah." *Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 1–11.

Hidayati, Maslihati Nur. "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Pranata Sosial*, Volume 1. Nomor 3 (2012), diakses pada 8 Mei

2023, Pukul 21:30 WITA, <http://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/download/59/46>.

Hutabarat, Martin. "Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang," 2013.

Moeri, Marcella Nirmala Chrisna, Idin Fasisaka, dan Putu Titah Kawitri Resen. "Implementasi Protokol dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang Menjadi Korban Human Trafficking". *Jurnal Hubungan Internasional*, Volume 1 Nomor 1 (2016), diakses pada 8 Mei 2023, Pukul 21:00 WITA, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/24370/15809>.

Naseh, Muhammad. "Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Indonesia Dan Eropa." *Jurnal Hubungan Internasional* 8, no. 1 (2019).

Nugroho, Bastianto, and M Roesli. "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 107. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>.

Sullivan, Barbara. "Trafficking in Human Being", dalam Laura J. Shepherd (ed). *Gender Matters in Global Politics: A Feminist Introduction in International Relations*. London and New York: Routledge, 2010), 89-95.

US Embassy for Indonesia. 2016. "Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016", diakses pada 8 Mei 2023, Pukul 23:50 WITA, <https://id.usembassy.gov/id/ourrelationship-id/official-reports-id>.

Wiraputra, Anindito R, and Kadek Fransisca Siba. "Analisis Penerapan Kebijakan Selektif Dalam Memperkuat Kontrol Perbatasan Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi." *Jurnal of Law and Border Protection* 3, no. 1 (2021): 77–86.

Wulandari, Cahya, Sonny Saptioajie Wicaksono, Fakultas Hukum, and Universitas Negeri. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang." *Yustisia Edisi 90* (2014): 15–26.

